

Tema Riset: Hubungan Internasional di Timur Tengah

LAPORAN AKHIR PENELITIAN BOPTN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
TAHUN ANGGARAN 2013



Arab Spring dalam Tinjauan Globalisasi dan Demokratisasi

Oleh:

1. DRS. AJAR TRIHARSO, MS (KETUA)
2. DRS. DJOKO SULISTYO, MS (ANGGOTA)
3. M. MUTTAQIEN, SIP, MA, Ph.D (ANGGOTA)
4. ADHI CAHYA FAHADAYNA (ANGGOTA)

**Dibiayai oleh BOPTN tahun Anggaran 2013, sesuai dengan Surat
Keputusan Rektor Universitas Airlangga
Nomor: 9069/UN/KR/2013 tanggal 28 Juni 2013**

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : Arab Spring dalam Tinjauan Globalisasi dan Demokratisasi
2. Bidang Penelitian : Hubungan Internasional di Timur Tengah
3. Peneliti Utama
 - a. Nama Lengkap : Drs. Ajar Triharso, MS
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 195212021983031001
 - d. Disiplin Ilmu : Hubungan Internasional
 - e. Pangkat/Gol : Lektor Kepala/IV-a
 - f. Jabatan : Penata
 - g. Fakultas/Jurusan : FISIP/Ilmu Hubungan Internasional
 - h. Alamat : Jl. Airlangga 4-6 Surabaya
 - i. No. Telepon/Fax : 031-5034015/031-5012442
 - j. E-mail : atriharso@yahoo.com
4. Jumlah anggota peneliti : 3 orang
5. Lokasi Penelitian : Surabaya
6. Jumlah biaya : Rp. 18.000.000,00

Surabaya, 1 November 2013

Mengetahui,



Drs. I. Basi Susilo, MA
NP 19540808198103007

Ketua Peneliti

[Signature]

Drs. Ajar Triharso, MS
NIP 195212021983031001

Mengetahui,

Ketua Lembaga Penelitian
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Airlangga



Dr. Endro Agus Purwanto, Apt., M.Si.
NIP. 195908051987011001

Kata Pengantar

Arab Spring adalah fenomena yang menonjol dalam dinamika hubungan internasional di kawasan Timur Tengah pada tahun 2011. Fenomena ini bahkan berkembang dan berlanjut sampai dengan sekarang. Kajian mengenai peristiwa ini bisa dilakukan dengan berbagai pendekatan. Penelitian ini mencoba mengkaji fenomena tersebut dengan melihat keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi. Dimensi yang diamati tidak hanya domestik, namun juga regional dan internasional.

Alhamdulillah penelitian tentang topik ini pada akhirnya dapat terselesaikan. Penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga yang telah mendanai penelitian ini, para kolega di Departemen Hubungan Internasional FISIP Unair, para mahasiswa terutama yang mengambil mata kuliah Masyarakat Budaya dan Politik Timur Tengah yang telah memberikan *feedback* dalam diskusi-diskusi di perkuliahan, termasuk diskusi lorong dengan mahasiswa himpunan HI terutama menyangkut masa depan di Suriah, dan rekan-rekan tenaga administrasi di departemen yang membantu peneliti dalam menyelesaikan problem-problem teknis selama proses penelitian. Atas semua bantuan yang diberikan kami mengucapkan banyak terima kasih. Harapan kami, Laporan Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa, kalangan akademisi dan masyarakat luas.

Terakhir, Laporan Penelitian ini tentu tidak sempurna dan ada kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu masukan, kritik dan saran sangat kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Surabaya, 14 November 2013

Tim Peneliti

Daftar Isi

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Bab 1 Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	5
Bab 2 Tinjauan Pustaka.....	6
Bab 3 Tujuan dan Manfaat.....	10
Bab 4 Metode Penelitian	12
Bab 5 Hasil dan Pembahasan	14
5.1. Globalisasi di Timur Tengah.....	14
5.2. Demokratisasi di Timur Tengah.....	19
5.3. Dimensi Domestik: Hubungan Elit dan Massa.....	21
5.4. Dimensi Regional : Antara Qaumiyya dan Wathaniyya.....	25
5.5. Dimensi Internasional: Turki, Dunia Islam dan Barat.....	28
Bab 6 Kesimpulan dan Saran.....	33
Daftar Pustaka	38

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanggal 17 Desember 2010 seorang pedagang kaki lima Muhammad Bouazizi (26 tahun) pergi ke tempat dia biasa bekerja di pusat kota Tunisia untuk menjual buah-buahan dan sayur-sayuran demi untuk menghidupi keluarganya dan membiayai kuliah adik perempuannya. Namun dia mendapati bahwa dia tidak diijinkan berdagang dan dagangannya disita. Untuk mendapatkan kembali barang dagangannya dia harus membayar denda, suatu peristiwa yang sudah pernah dia alami sebelumnya. Ketika dia mau membayar denda kepada seorang polisi wanita, justru dia mengalami pelecehan berupa pemukulan dan diludahi wajahnya sambil diperolok-olok keluarganya. Tidak terima dengan perlakuan ini, Bouazizi komplain ke pejabat setingkat provinsnsi, namun permintaan audiensi tidak ditanggapi. Kecewa dengan perlakuan tersebut, diluar dugaan dia membakar dirinya sebagai bentuk protes atas ketidakadilan ini (Tocqueville, 2011).

Peristiwa bakar diri yang dilakukan oleh seorang pedagang ini kemudian memicu gelombang protes rakyat Tunisia kepada penguasa tiran di negeri itu. Perekonomian Tunisia yang semakin merosot mengakibatkan meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Pada saat yang bersamaan Presiden Ben Ali dan kroni-kroninya hidup dalam kemewahan. Hal ini yang memicu kebencian rakyat Tunisia sehingga demonstrasi berlangsung terus menerus sampai akhirnya memaksa rezim Ben Ali yang sudah berkuasa selama 33 tahun lengser pada 14 Januari 2011.

Apa yang terjadi di Tunisia kemudian menjalar ke negara-negara Arab lainnya. Negara di kawasan Afrika Utara yang berbatasan langsung dengan Tunisia yaitu Libya juga terjadi pergolakan menuntut pergantian rezim Kadlafi. Berbeda dengan Tunisia yang tidak sampai terjadi perang saudara, di Libya perang saudara pecah. Bahkan kekuatan eksternal yaitu NATO ikut terlibat langsung dalam konflik domestik ini dengan mendukung kelompok oposisi. Sampai pada

akhirnya regime Kadlafi tumbang ditandai dengan tewasnya yang bersangkutan dalam sebuah penghadangan yang dilakukan oleh kelompok oposisi.

Negara tetangga yang lain yaitu Maroko merespon apa yang terjadi di Tunisia dan Libya dengan melakukan demokratisasi ditandai dengan pemilu multi partai pada 27 November 2011. King Muhammad IV dari Maroko khawatir gelombang protes akan menjalar di negerinya bila pendekatan otoriter terus dia gunakan. Respon yang sama juga terjadi di Aljazair dan Yordania. Sementara itu, di kawasan Teluk kecuali di Qatar dan Kuwait, perubahan politik tidak terjadi secara mencolok mengingat negara-negara di kawasan ini terutama Arab Saudi, UEA, dan Oman dengan pendekatan kesejahteraan (*welfare state*) di satu sisi dan authoritarianisme di sisi lain relatif bisa bertahan dari kekuatan-kekuatan yang menginginkan perubahan politik. Sementara itu, di Bahrain tuntutan dari kelompok mayoritas Syiah di negara ini untuk lebih memiliki akses kekuasaan harus berhadapan dengan kekuatan minoritas Sunni yang didukung oleh Arab Saudi.

Tuntutan perubahan politik juga menjalar di Yaman ketika rakyat di negara yang berhadapan langsung dengan Laut Arab ini menuntut Presiden Abdullah Shaleh turun dari jabatannya. Hal yang sama dan juga dramatis sebagaimana terjadi di Tunisia terjadi di Mesir ketika Presiden Husni Mubarak harus meninggalkan istananya setelah demonstrasi yang terjadi berhari-hari di bulan Januari dan Februari 2011. Pemilihan umum yang dilaksanakan di negara tersebut menempatkan Ikhwanul Muslimin sebagai peraih suara terbanyak di parlemen dan bahkan memenangkan pemilihan presiden dengan menempatkan Muhammad Mursi sebagai pengganti Mubarak.

Sementara itu, sebagai imbas dari Arab Spring perang saudara masih terus berkecamuk di Syiria yang sampai saat ini telah menewaskan lebih dari 70.000 jiwa ketika kelompok-kelompok oposisi menuntut President Bashar Assad turun dari jabatannya. Minoritas Alawi (11%) yang memerintah Syiria dibawah Assad dengan kekuatan militer yang dimiliki berhadapan dengan kelompok-kelompok oposisi yang didominasi kalangan Sunni (70%). Konflik ini melibatkan

kekuatan-kekuatan luar seperti Iran, faksi Hezbollah, dan Rusia yang mendukung Assad di satu sisi dan Turki, negara-negara Arab, dan negara-negara Barat yang mendukung oposisi di sisi yang lain.

Dalam melihat dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini, kajian yang dipakai pada umumnya melihat pola hubungan antara elit dan massa. Bagaimana ketidakpuasan massa dilampiaskan kepada elit dengan memanfaatkan momentum. Bisa dikatakan keberhasilan di Tunisia itulah yang menjadi inspirasi bagi gerakan-gerakan serupa di negara-negara lain di Timur Tengah. Selain itu, dinamika yang terjadi di Timur Tengah ini juga dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi terutama internet sebagai media untuk menyebarluaskan berita. Ketika rezim yang berkuasa mengekang kebebasan mendapatkan informasi terutama melalui media massa formal, gerakan-gerakan oposisi di Timur Tengah menggunakan kekuatan media alternatif terutama jejaring sosial untuk melakukan perlawanan. Inilah contoh bagaimana sebuah isu yang bersifat lokal bisa menjadi global karena pengaruh perkembangan teknologi informasi.

Globalisasi merujuk pada proses percepatan dan intensifikasi mekanisme, proses, dan aktivitas dalam banyak hal yang mengakibatkan timbulnya saling ketergantungan global. Globalisasi ditandai dengan perluasan aktivitas sosial, politik dan ekonomi yang melintas batas negara, sehingga peristiwa, keputusan, dan tindakan yang diambil di satu negara atau kawasan berimbas kepada individu dan komunitas di kawasan lain. Semakin tumbuh dan berkembang keterkaitan satu dengan yang lain mulai dari ekonomi ke ekologi, dari microsoft ke microbes, dari world trade ke weapons of mass destruction (McGrew, 2011:22). Akselerasi interaksi dalam skala global ini adalah akibat dari kemajuan teknologi informasi dan sistem transportasi. Tumbuhnya kesadaran kolektif bahwa kejadian-kejadian yang bersifat lokal bisa berubah menjadi mengglobal, demikian sebaliknya peristiwa yang bersifat global bisa memberikan konsekuensi bagi kehidupan lokal itulah yang terjadi dalam fenomena Arab Spring di Timur Tengah.

Selain itu, apa yang terjadi di Timur Tengah adalah realitas politik internasional yang bersifat anarchy ketika institusi global seperti Liga Arab, Organisasi Konferensi Islam, dan

Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diharapkan bisa mencegah kekisruhan politik yang memakan korban jiwa dalam jumlah besar seperti yang terjadi di Syria tidak mampu menjalankan perannya dengan baik. *Global governance* yang diharapkan mampu menangani hal-hal teknis, kelembagaan, aturan, norma, kesepakatan-kesepakatan legal untuk mengatur hubungan antar negara dan juga untuk memfasilitasi dinamika hubungan antar negara yang mengalami konflik sebagai akibat dari kekisruhan domestik ternyata belum maksimal mengambil perannya.

1.2. Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang sebagaimana dikupas di Pendahuluan, penelitian ini membahas keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa terjadi pergolakan politik dengan munculnya fenomena Arab Spring di Timur Tengah? Bagaimana keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi dalam kasus Arab Spring ini? Bagaimana keterlibatan aktor negara dan non-negara dalam menggerakkan tuntutan perubahan di negara-negara Timur Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi di negara-negara Arab dengan Arab Spring sebagai studi kasus. Analisis ini dilakukan dengan mengamati dimensi domestik, regional dan global yang melingkupi peristiwa Arab Spring tersebut.
- b. Menemukan jalinan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lain sebagai salah satu ciri era globalisasi dan bagaimana jalinan tersebut menjadi sebuah bola salju yang dikenal dengan Arab Spring.

- c. Menjelaskan bagaimana aktor negara baik di kawasan Timur Tengah sendiri maupun di luar Timur Tengah memberikan kontribusi bagi terjadinya Arab Spring.
- d. Menganalisis peran institusi regional dan global dalam merespon perubahan-perubahan di Timur Tengah ketika Arab Spring melanda kawasan tersebut.
- e. Menjelaskan interkoneksi antara aktor civil society dalam lingkup satu negara dengan aktor civil society dalam lingkup internasional (*global civil society*) dan menjelaskan peran mereka dalam Arab Spring.

1.4. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menjelaskan korelasi antara dua variabel yaitu globalisasi dan demokratisasi di negara-negara Arab dengan menggunakan Arab Spring sebagai contoh kasus. Data-data diperoleh dengan melakukan studi literature mengenai fenomena tersebut. Data-data sekunder ini didapatkan dari pemberitaan media massa, artikel dalam jurnal ilmiah, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema di atas. Temuan-temuan awal dari studi literatur tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan peristiwa yang terjadi, keterlibatan aktor negara dan non negara dalam peristiwa tersebut, kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat, dan pola-pola interaksi diantara aktor-aktor yang tersebut.

Temuan-temuan dalam penelitian tahap awal ini selanjutnya dikombinasikan dengan kerangka perfikir yang digunakan dalam penelitian ini khususnya yang membahas tentang globalisasi dan perubahan politik domestik menuju demokrasi untuk selanjutnya ditemukan korelasi diantara dua variabel di atas (globalisasi dan demokratisasi). Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif akan ditemukan pola hubungan antara globalisasi dan demokratisasi di Timur Tengah dengan Arab Spring sebagai fenomena yang diamati.

Jangkauan penelitian dalam studi ini adalah sejak munculnya peristiwa bakar diri yang dilakukan oleh seorang pekerja di Tunisia pada pertengahan 2010 sebagai pemicu gelombang protes

di Tunisia yang kemudian merebak di kawasan Arab lainnya sampai dengan akhir 2012. Tidak ada alasan spesifik mengapa jangkauan akhir dari penelitian ini sampai dengan akhir 2012 karena apa yang terjadi di Timur Tengah saat ini terus berproses bahkan dampak dari Arab Spring sampai dengan sekarang masih terus terjadi dan mengarah kepada kekacauan politik seperti yang terjadi di Syria, Mesir, dan Yaman.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab pertama dari riset ini, sebagaimana sudah dipaparkan di awal membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian. Bab kedua membahas studi kepustakaan tentang fenomena Arab Spring untuk mendapatkan gap pengetahuan yang belum dibahas oleh para peneliti sebelumnya. Bab ketiga mendiskusikan keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi di Timur Tengah baik dalam tinjauan historis maupun kekinian dengan melihat gelombang revolusi di kawasan ini. Bab keempat menganalisis dimensi Arab Spring baik dalam scope domestik, regional dan internasional. Terakhir, bab kelima kesimpulan.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

Kajian tentang dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah akhir-akhir ini atau yang dikenal dengan Arab Spring 2011 fokus pada dua hal: mengapa ada rezim yang dapat bertahan dalam menghadapi gelombang tuntutan perubahan ke arah kehidupan yang demokratis dan mengapa ada rezim yang tidak mampu bertahan. Tobin (2012) berpendapat bahwa bertahannya rezim dari tuntutan perubahan disebabkan oleh diakomodasikannya kelas menengah dalam kehidupan politik sehingga keinginan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim yang berkuasa bisa diredam. Hal ini bisa dilihat di Yordania ketika Raja Abdullah dari Dinasti Hasyimiyah menyelenggarakan sistem pemilu multi partai jauh sejak fenomena Arab Spring muncul. Hal yang sama juga terjadi di Maroko kendatipun bersamaan dengan saat merebaknya gelombang tuntutan perubahan rezim, Raja Muhammad IV langsung merespon dengan membuka kran demokrasi dengan sistem multi partai. Pendekatan berbeda terjadi di Arab Saudi yaitu dengan memberikan peran yang lebih besar kepada para ulama sehingga mereka bisa menjadi benteng pertahanan bagi tuntutan-tuntutan perubahan politik di negara tersebut sambil terus berusaha memperluas hak-hak sipil (Alhargan 2012).

Kelompok menengah di Timur Tengah ternyata muncul dari kalangan pergerakan Islam yang direpresentasikan oleh Ikhwanul Muslimin. Di negara-negara seperti Mesir, Tunisia, Syria, dan Libya, Ikhwanul Muslimin adalah gerakan Islam yang termarginalkan secara politik sehingga ketika ada momentum untuk melakukan perubahan politik menuju ke arah kehidupan yang demokratis, gerakan yang memang memiliki basis massa yang besar ini tampil ke permukaan untuk melakukan perlawanan atas rezim tirani yang berkuasa (Voll et al 2012). Kecuali di Syria, di negara-negara tersebut Ikhwanul Muslimin tumbuh di negara-negara mayoritas Sunni dan dari

kelompok Sunni pula rezim otoriter memegang kekuasaan. Hal yang berbeda terjadi di Syria dan Lebanon yang relatif terfragmentasi masyarakatnya (Khashan 2011). Ikhwanul Muslimin tumbuh di negara yang penguasanya (Presiden Bashar Assad) berasal dari kelompok Alawi (salah satu sekte dalam Syi'ah). Oleh karena itu, terlihat bahwa pertarungan dalam konflik di Syria demikian keras karena Presiden Assad khususnya dan para penganut Alawi pada umumnya tidak mau menyerahkan pergantian kekuasaan melalui mekanisme demokrasi karena kemungkinan besar kelompok Sunni yang akan mengambil alih kekuasaan (Landis 2012).

Kelompok menengah ini tumbuh di kalangan para pemuda yang *melek* dengan perkembangan teknologi sehingga dengan memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut digunakan sebagai alat perlawanan. Apa yang terjadi di Tahrir Square Mesir adalah contoh bagaimana internet dengan fasilitas facebook, twitter, youtube, dan lain-lain dipakai sebagai media untuk menggalang dukungan di dalam dan luar negeri (Lesch 2011). Termasuk juga keberadaan stasiun TV satelit di Timur Tengah seperti *Al-Jazeera* (Qatar) memberikan kontribusi bagi perubahan politik di negara-negara Timur Tengah. *Al-Jazeera* yang berbasis di Qatar sejak awal muncul selalu kritis kepada rezim-rezim otoriter di Timur Tengah sampai-sampai Presiden Husni Mubarak ketika masih berkuasa mengomentari, "Sumber permasalahan di Timur Tengah muncul karena kotak ini (TV)." (Bahry 2001).

Kajian lebih lanjut setelah munculnya Arab Spring adalah terkait dengan bagaimana model yang akan diambil pasca tumbang rezim otoriter di negara-negara Arab. Perdebatan muncul apakah akan dipakai model Irak ataukah model Turki. Proses demokratisasi di Irak lebih didorong oleh kekuatan-kekuatan eksternal terutama Amerika Serikat dengan mendesain konstitusi di Irak, sementara model Turki lebih menekankan proses demokratisasi dari dalam. Dalam hal ini, terlihat upaya-upaya perebutan pengaruh antar kekuatan eksternal untuk menawarkan model demokrasi yang dikembangkan di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat misalnya, berusaha untuk terlibat lebih intensif dalam dinamika perubahan di Mesir dan negara-negara Arab lainnya (Snider and Faris 2011). Namun pada kenyataannya terlihat bahwa kekuatan-kekuatan politik terutama dari

kalangan pergerakan Islam ingin menjadikan Turki sebagai model. Terlebih Turki sendiri memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok oposisi di negaranya (Bengio 2012). Jajak pendapat yang dilakukan oleh YouGov Survey juga menunjukkan bahwa mayoritas responden di negara-negara kawasan Afrika Utara, Lebanon, dan Syria menilai bahwa demokratisasi di Turkey adalah model yang ideal untuk diadopsi di negara-negara yang mengalami krisis politik. Turki dalam hal ini tidak dilihat sebagai Turki sekular seperti era Kemal Attaturk, akan tetapi Turki yang lebih Islamis dibawah Erdogan (Unver 2013).

Selain itu kajian pasca Arab Spring tidak hanya pada reformasi sistem politik domestik, namun juga mengarah bagaimana menjadikan Timur Tengah pasca Arab Spring menjadi kawasan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Doron (2012) berpendapat bahwa Timur Tengah yang baru akan muncul ketika negara-negara di kawasan ini masuk dalam global market, karena diyakini ketika masuk ke pasar global kesejahteraan di kawasan ini akan meningkat sehingga stabilitas politik akan terwujud.

Dari kajian sebagaimana dibahas di atas, umumnya perspektif yang digunakan untuk melihat fenomena Arab Spring adalah dengan menekankan dinamika politik domestik dan bagaimana politik domestik tersebut kemudian berpengaruh terhadap perubahan-perubahan politik di negara-negara yang mengalami gejolak politik. Selain itu, kajian tentang model seperti apa yang tepat untuk diterapkan di negara-negara Arab pasca Arab Spring juga menjadi fokus riset tentang pergolakan politik di Arab. Riset tentang keterkaitan antara fenomena Arab Spring dengan globalisasi belum menjadi perhatian dalam kajian-kajian di atas. Oleh karena itu, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada keterkaitan antara globalisasi dan demokratisasi dengan fenomena Arab Spring sebagai bahan kajian.

Bab 3

Globalisasi dan Demokratisasi di Timur Tengah

3.1. Globalisasi di Timur Tengah

Globalisasi ditandai oleh pola hubungan yang saling terkait satu dengan yang lain tanpa dibatasi oleh batas-batas kewilayahan. Hubungan antar negara atau antar kawasan terjadi sedemikian rupa sehingga ada ketergantungan yang terkadang sangat sulit untuk dipisahkan. Arus globalisasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah dan kawasan lainnya setidaknya dapat dilihat dari peristiwa embargo minyak yang dipelopori oleh Arab Saudi. Embargo ini dipicu oleh Perang Arab-Israel tahun 1973. Dalam peperangan ini, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa seperti Belanda secara terbuka mendukung Israel ketika negara ini berkonflik dengan negara-negara Arab terutama Mesir. Merespon dukungan tersebut, negara-negara Teluk penghasil minyak dengan disponsori oleh Arab Saudi mengembargo minyak ke negara-negara yang mendukung Israel. Akibat embargo terjadi kelangkaan minyak di pasar internasional sehingga harga minyak melambung tinggi.

Melambungnya harga komoditas utama dunia yang menggerakkan perekonomian dan industri ini berdampak pada munculnya resesi ekonomi. Kenaikan harga minyak yang sangat tinggi mengakibatkan industri-industri tidak bisa memproduksi karena mahal dan langkanya komoditas ini. Pada saat yang bersamaan ketika harga minyak tinggi, negara-negara

penghasil minyak termasuk Indonesia menikmati keuntungan yang berlipat ganda dari penjualan minyak di pasar internasional. Fenomena ini memunculkan apa yang kemudian dikenal dengan istilah petro dollar. Negara-negara Teluk yang menikmati keuntungan dari booming minyak kemudian menyimpan dan menginvestasikan modalnya di bank-bank Eropa. Dana tersebut kemudian digunakan untuk menggerakkan ekonomi yang mengalami krisis di kawasan Eropa. Persoalan muncul karena untuk mengatasi krisis bukan perkara yang mudah dan memerlukan jangka waktu. Sekalipun ada sumber dana baru dari negara-negara Timur Tengah ke bank-bank Eropa, tetap saja belum sepenuhnya membantu pemulihan krisis, sehingga jalan satu-satunya untuk mengatasi krisis adalah mencabut kembali embargo dan menggelontorkan minyak ke negara yang selama ini diembargo.

Apa yang diuraikan di atas menggambarkan adanya keterkaitan dan ketergantungan antar negara atau antar kawasan dalam pemenuhan pasokan energy. Dengan kata lain fenomena globalisasi dalam kaitannya dengan distribusi sumber-sumber energy terlihat dengan jelas dalam kasus ini. Kendatipun Timur Tengah merupakan negara penghasil minyak dan mendapatkan keuntungan dari booming minyak, namun ketika mereka ingin menjadikan keuntungan dari penjualan minyak sebagai capital yang dapat menggerakkan ekonomi dengan orientasi profit pada kenyataannya sulit untuk diwujudkan. Ketika pihak-pihak yang mendapatkan dana segar menghadapi kelesuan ekonomi karena daya beli yang menurun, dana yang diinvestasikan tidak langsung memberikan keuntungan ekonomi. Oleh karena itu, beberapa negara yang mendapatkan keuntungan berlipat akibat booming minyak, seperti Indonesia, memanfaatkan keuntungan tersebut untuk pembangunan infra struktur.

Selain berkaitan dengan pasokan energy, globalisasi juga identik dengan liberalisasi perdagangan. Dalam dinamika ekonomi internasional, ketertarikan negara-negara Timur Tengah untuk masuk dalam rezim perdagangan bebas cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan

keinginan untuk menjadi anggota GATT atau kemudian berubah menjadi WTO. Arab Saudi sebagai aktor utama di kawasan ini, ternyata memiliki minat yang sangat tinggi untuk masuk ke WTO. Negara ini sudah mengajukan diri menjadi anggota GATT/WTO sejak tahun 1996. Dan diluluskan keanggotaannya sejak tahun 2008. Peraturan-peraturan dagang domestik Arab Saudi perlu banyak perubahan sehingga compatible dengan aturan dagang WTO. Ini yang menyebabkan keanggotaan Arab Saudi lambat dibandingkan dengan negara-negara Arab lainnya seperti United Arab Emirates, Qatar, Bahrain dan Oman.

Kecenderungan negara-negara Arab untuk masuk lebih dalam dalam perdagangan internasional juga dilihat dari berkembangnya pusat-pusat jasa keuangan di kawasan ini. United Arab Emirates mengembangkan Abu Dhabi sebagai sentral perdagangan dan jasa keuangan di Timur Tengah menyaingi Hongkong dan Singapura di kawasan Asia Timur. Kesadaran bahwa sumber daya alam minyak suatu saat nanti akan habis, mendorong elit politik di negara tersebut mencari alternatif lain untuk menggerakkan ekonomi mereka. Dengan memanfaatkan keuntungan geografis kawasan Teluk yang kaya sumber daya alam minyak dan sebagai kota pelabuhan, Abu Dhabi berkembang menjadi kota shipping dan dodging bagi kapal-kapal besar yang melewati kawasan ini, bahkan Bandara Abu Dhabi berkembang menjadi bandara transit yang menghubungkan Asia, Eropa, dan Afrika. Keuntungan ekonomi dari minyak yang sampai saat ini masih diperoleh diinvestasikan untuk membangun gedung-gedung pencakar langit sebagai pusat-pusat bisnis. Arab Saudi pun tidak ketinggalan dengan mengembangkan Jeddah sebagai pusat bisnis dan seolah bersaing dengan Abu Dhabi juga berencana membangun gedung-gedung tinggi mengalahkan popularitas Burj Al-Arab.

Negara tetangga UAE, Qatar juga sedang berusaha untuk menjadi pusat perubahan di Timur Tengah terutama dengan keberadaan media berbahasa Arab yang sangat berpengaruh

di Timur Tengah yaitu *Al-Jazeera*. Ketika terjadi Perang Teluk II, operasi militer Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengusir Irak dari Kuwait mendapat liputan luar biasa dari media Amerika *CNN*. Model peliputan dengan menyertakan awak media dalam operasi militer atau lebih dikenal dengan istilah *embedded journalists* dan menyiarkan secara langsung (live) kondisi *battle ground* terkini ke seluruh penjuru dunia menjadikan Perang Teluk II sebagai media propaganda AS. Publik domestik di AS pun mendukung operasi militer ini. Namun, situasi berubah ketika AS dibawah Goerge Walker Bush mengkampanyekan “war on terror” pasca serangan 11 September 2001 ke Pentagon dan gedung WTC di New York yaitu dengan melakukan invasi ke Afghanistan untuk memburu Usamah bin Laden, monopoli pemberitaan oleh *CNN* atau *BBC* tidak lagi terjadi. Hal ini dikarenakan munculnya media berbahasa Arab yang dipancarluaskan di kawasan Timur Tengah yakni *Al-Jazeera*. Di saat *CNN* dan *BBC* menampilkan keberhasilan operasi militer di Afghanistan, *Al-Jazeera* menampilkan sisi lain dari perang itu sendiri seperti jatuhnya korban di pihak sipil. Tidak hanya itu, keberhasilan *Al-Jazeera* mewawancarai tokoh-tokoh kunci rezim Taliban di Afghanistan menjadi penyeimbang pemberitaan media massa Barat. Terlebih ketika *Al-Jazeera* secara eksklusif berhasil mewawancarai Usamah bin Laden dan Dr Ayman Al-Zawarihi memunculkan tuduhan bahwa media ini telah menjadi “corong” teroris. Oleh karena itu, dalam operasi militer AS di Afghanistan sasaran serangan bukan hanya tentara Taliban akan tetapi juga kantor *Al-Jazeera*. Hal yang sama terulang pada serangan AS ke Irak tahun 2003, dimana stasiun *Al-Jazeera* menjadi target serangan rudal-rudal AS.

Paparan di atas menunjukkan bahwa globalisasi dalam bidang media telah dimanfaatkan baik oleh negara aggressor, negara yang diduduki, dan aktor-aktor non negara termasuk kelompok-kelompok yang dikategorikan AS sebagai teroris. Perkembangan

terakhir, media sosial seperti facebook, twitter, milist, dan youtube juga dijadikan sebagai ajang untuk mendorong proses perubahan diberbagai negara di Timur Tengah, merekrut pengikut, memkampanyekan aksi, dan perlawanan atas penindasan penguasa seperti yang terjadi dalam Arab Spring.

Transformasi di bidang informasi yang terjadi di Timur Tengah dalam tataran politik, menciptakan apa yang dikenal sebagai *political community* yaitu sekumpulan manusia yang diantara anggotanya diikat kesamaan simbol, saling bekerjasama untuk merealisasikan tujuan mereka. Komunitas ini berusaha untuk mengatur diri mereka sendiri dengan pijakan aturan yang bebas sehingga tidak teralienasi aturan tersebut (Linklater, 2005:713). Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mendemokratiskan kehidupan politik mereka tanpa harus menunggu institusi formal dan legitimate yaitu negara. Fenomena Arab Spring adalah gerakan massa yang memang menginginkan diakuinya eksistensi pihak di luar negara untuk lebih hidup bebas dan mendapatkan apa yang menjadi haknya.

Gerakan-gerakan Islam yang menginginkan perubahan politik seperti Ikwanul Muslimin di Mesir, An-Nahda di Tunisia, Al-Ishlah di Yaman, Hamas di Palestina, dan Hezbollah di Lebanon pertumbuhannya berada di luar koridor negara. Gerakan-gerakan tersebut memiliki disiplin organisasi yang mengikat anggotanya yang bahkan institusi formal negara mengalami kesulitan untuk mengontrol. Ikhawanul Muslimin, sebagai contoh, kendatipun organisasi ini ditetapkan sebagai gerakan terlarang di Mesir sejak Gamal Abdul Nasser berkuasa tahun 1950an yang kemudian berlanjut pada masa Anwar Sadat dan Husni Mubarak, namun pada kenyataannya ia tetap eksis hingga saat ini. Contoh yang lain, Hamas tumbuh dan berkembang di luar control Palestinian Authority sebagai produk kesepakatan Oslo 1993 dan gerakan ini berhasil menggeser dominasi Fatah pada pemilu 2006. Yang paling menyolok adalah Hezbollah di Lebanon Selatan yang bertindak seakan negara dalam

negara karena organisasi ini memiliki independensi dari pemerintahan Beirut, memiliki angkatan bersenjata, dan bahkan terlibat konflik langsung dengan Israel. Arab Spring memberikan kesempatan kepada *political community* semacam ini untuk berpartisipasi dalam perubahan politik di negara masing-masing. Perubahan yang mengarah kepada kehidupan politik yang lebih demokratis.

3.2. Demokratisasi di Timur Tengah

Demokratisasi adalah suatu proses yang diawali dengan runtuhnya rezim otoriter, pelembagaan aturan main yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, dan konsolidasi rezim yang demokratis. Proses peralihan dari runtuhnya rezim otoriter menuju ke penegakkan sistem demokrasi disebut sebagai masa transisi (Huntington, 1991). Pada periode transisi ini, situasinya tidak menentu sehingga sangat mungkin runtuhnya rezim otoriter tidak diikuti rezim yang demokratis, akan tetapi malah diikuti oleh tampilnya rezim otoriter yang baru. Dengan kata lain, tidak terjadi proses demokratisasi. Situasi dan kondisi yang semacam ini setidaknya bisa dilihat di Mesir kendatipun sampai dengan saat ini situasinya tidak menentu.

Fenomena demokratisasi di Timur Tengah mengemuka diawali dengan peristiwa pemilu multi partai di Aljazair tahun 1990. Krisis politik domestik dan ekonomi Aljazair dibawah Chadli ben Jadid ketika itu mendorong dia melaksanakan pemilu dalam rangka memperkuat legitimasi politiknya. Front Nasional sebagai satu-satunya kekuatan politik dominan sejak kemerdekaan Aljazair tahun 1965 membuka kran demokrasi dengan memberikan kesempatan partai-partai politik di luar partai pemerintah untuk berkembang. Di luar dugaan, Front Penyelamat Islam (FIS) yang berbasiskan Muslim militant memenangkan pemilihan di tingkat kota praja sampai dengan 70 persen. Menghadapi kenyataan ini elit yang

berkuasa dan kepentingan-kepentingan asing terutama Perancis yang selama ini mendapatkan keuntungan dari pola hubungan dengan elit dari Front Nasional merasa khawatir. Kekhawatiran itu ditunjukkan dengan membatalkan kemenangan FIS dan rencana pemilu nasional yang sedianya akan diselenggarakan pada awal tahun 1991 ditunda (Esposito, 1995).

Penundaan ini menimbulkan pertentangan tajam antara kubu Islam dengan kubu sosialis sekuler (Front Nasional) yang didukung sepenuhnya oleh militer. Akibatnya terjadilah konflik fisik karena pihak militer tetap kukuh membubarkan FIS dan elemen-elemen pendukungnya. Menghadapi ini sebagian kalangan pendukung FIS yang tidak puas dengan keputusan militer ini mengangkat senjata, sehingga terjadilah perang sipil dengan konsekuensi jatuhnya korban rakyat Aljazair, situasi politik yang tidak menentu, dan perekonomian yang tidak stabil. Militer baru bisa sepenuhnya mengontrol Aljazair pada pertengahan 2000an. Bagaimana kemudian fenomena tuntutan untuk mendemokratisasikan kehidupan politik di Timur Tengah saat ini dibahas pada bab berikut.

Bab 4

Arab Spring: Dimensi Domestik, Regional dan Global

4.1. Dimensi Domestik: Hubungan Elit dan Massa

Pola hubungan elit dan massa dalam kehidupan sosial di Timur Tengah dapat dikategorikan menjadi tiga struktur: elit tradisional, elit transisional dan elit modern. Elit tradisional mengacu pada kekuatan tradisi yang merekonstruksi hubungan antara elit dan massa. Elit dalam hal ini berasal dari kepala suku (kabilah), ulama, pemimpin militer (*war lords*), para saudagar, pemilik tanah (*land lords*) dan kalangan bangsawan. Ketika terjadi ketidakstabilan hubungan diantara elit tradisional atau antara elit tradisional dengan massa, maka akan muncul struktur elit yang kedua yaitu elit transisional. Dalam struktur elit transisional ini terjadi pemisahan peran antara elit tradisional dan modern. Sedangkan struktur elit modern merujuk pada suatu mekanisme hubungan antar elit atau antara elit dan massa yang didasarkan pola hubungan modern yang mengacu pada konstitusi (Andersen, 1998)

Struktur hubungan ini mengalami pergeseran terutama ketika terjadi gelombang demokratisasi di Timur Tengah. Struktur elit di beberapa negara Timur Tengah tidak lagi sepenuhnya tradisional dan ataupun modern, namun, lebih cenderung mengarah pada transisional. Arab Spring telah menggeser ikatan-ikatan kesukuan dan ikatan-ikatan tradisional lainnya (Jones, 2011). Perubahan ini disebabkan oleh munculnya kekuatan baru dari kalangan masyarakat yang tidak terkooptasi oleh kekuatan-kekuatan elit yang ada sebelumnya. Mereka ini adalah organisasi-organisasi keagamaan yang tidak hanya bergerak di bidang sosial keagamaan, namun juga bergerak di bidang politik. Sebuah transformasi

sosial yang didorong oleh deprivasi relative yang menyebar di negara-negara Timur Tengah dan menemukan momentum ketika terjadi pergolakan di Tunisia. Ikatan yang menggerakkan mereka bukan ikatan-ikatan tradisional, namun ikatan persamaan nasib dan kekecewaan kepada rezim yang tiran.

Sebagai gambaran Ikhwanul Muslimin di Mesir adalah suatu kekuatan yang mampu menghimpun massa yang tidak didasarkan pada ikatan-ikatan elit tradisional. Mereka diikat oleh sebuah visi dan misi perjuangan sebagaimana tergambar dalam urutan amal (aksi). Gerakan ini bertujuan membentuk pribadi Muslim, membentuk keluarga Muslim, membentuk masyarakat Muslim, membebaskan negeri Muslim dari segala macam bentuk dominasi asing, membentuk sistem pemerintahan yang Islami, dan menjadikan Islam sebagai guru bagi semesta alam. Mereka bukan merupakan bagian dari elit ulama di Mesir, dalam hal ini Al-Azhar, bahkan terkadang berseberangan dengan elit tradisional tersebut. Ini terlihat dari hubungan yang tidak harmonis antara Syaikh Al-Azhar dengan gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir terutama saat terjadi pergolakan di negeri ini. Ketika terjadi demonstrasi di Tahrir Square dengan mengatasnamakan gerakan Tamarrod menuntut Presiden Mohammad Morsi turun dari jabatannya dan ketika militer dibawah Jenderal As-Sisi pada akhirnya meng kudeta Presiden Morsi pada bulan Agustus 2013, Syaikh Al-Azhar berada di barisan yang menentang Presiden Morsi.

Dinamika politik domesik sebagai akibat dari perkembangan teknologi tidak lagi menjadi konsumsi elit, akan tetapi sudah masuk menjadi ranah publik. Bahkan pergerakan-pergerakan massa menentang rezim otoriter dilakukan dengan menggunakan teknologi modern seperti facebook, twitter, milist, dan media lainnya tanpa ada sensor. Aksi-aksi yang mereka lakukan di-*upload* di youtube diakses oleh public domestik dan internasional. Upaya yang dilakukan oleh rezim yang berkuasa untuk membatasi informasi public ternyata tidak

berhasil, karena kekuatan-kekuatan di luar negara yang mengalami pergolakan ikut membantu menyebarkan informasi keluar dari wilayah konflik. Revolusi di Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, dan Syiria adalah gambaran tentang pengaruh transformasi teknologi informasi dalam kehidupan politik.

Idealnya ketika elit tradisional berhasil digulingkan akan menghasilkan elit transisional yang mengantarkan sistem politik menuju terwujudnya elit modern. Namun, upaya mewujudkan ini bukan perkara yang gampang. Hal ini disebabkan elit-elit lama masih menduduki jabatan-jabatan strategis dan mereka tidak mau mengorbankan kepentingan mereka ketika terjadi transisi. Elit militer yang pada umumnya mendapat privilege dalam struktur elit tradisional tidak rela apabila hak-hak istimewa yang selama ini mereka peroleh hilang ketika terjadi transformasi politik. Elit militer di Mesir, contohnya, mereka dengan terang-terangan mengukudeta Presiden Morsi yang terpilih secara demokratis karena khawatir privilege yang menyangkut sumber-sumber ekonomi yang diperoleh selama rezim Mubarak berkuasa seperti pengelolaan Terusan Suez menjadi hilang. Elit militer di Libya, kalau seandainya tanpa campur tangan NATO, bisa jadi masih tetap bercokol dan tidak mau tunduk dengan kekuatan oposisi seperti yang terjadi di Suriah saat ini.

Selain elit militer, elit pengusaha yang selama ini mendapatkan keuntungan-keuntungan bisnis dari penguasa diktator juga berusaha menghalang-halangi transformasi politik menuju kehidupan yang lebih demokratis. Perusahaan-perusahaan minyak yang beroperasi di Arab Saudi, misalnya, tentu tidak menghendaki apabila perubahan sistem politik yang lebih demokratis di negeri ini akan menggeser dinasti yang ada yang sangat mungkin tidak pro dengan kepentingan mereka. Salah satu alasan mengapa FIS di Aljazair diganjil untuk memenangkan pemilu nasional adalah karena kekhawatiran perusahaan-perusahaan Perancis yang sudah banyak menginvestasikan modalnya di Aljazair. Mereka

khawatir kalau kalangan Islam memegang tampuk kekuasaan keuntungan ekonomi yang mereka peroleh selama ini akan tergerus (Esposito, 1993).

Selain elit militer dan pengusaha, pihak lain yang dapat menjadi penghalang bagi transformasi ke arah kehidupan yang demokratis adalah birokrasi. Saat HAMAS berhasil memenangkan pemilu, salah satu hambatan untuk merealisasikan tujuan politik HAMAS adalah resistensi birokrasi Otoritas Palestina yang didominasi faksi Fatah. Ketika terjadi kekacauan politik akibat isolasi Israel dan Barat, HAMAS tidak dapat menggerakkan kementrian dalam negeri untuk mewujudkan tertib sipil (Muttaqien, 2012). Hal yang sama juga dialami Ikhwanul Muslimin di Mesir yaitu masih banyaknya pejabat-pejabat di Mesir yang masih loyal kepada mantan Presiden Hosni Mubarak kendatipun ia berada dalam status tahanan militer dan pemerintahan sudah berada di tangan Morsi. Terbukti upaya-upaya untuk menyeret Hosni Mubarak di meja peradilan mengalami kesulitan, bahkan ketika Presiden Morsi berhasil dikudeta, mantan Presiden Mubarak malah dibebaskan dari penjara militer dan menjalani tahanan rumah.

4.2. Dimensi Regional: Antara Qaumiyya dan Wathaniyya

Rentetan gelombang demokratisasi yang melanda kawasan Timur Tengah khususnya di negara-negara Arab tidak dapat dilepaskan dari adanya dua model nasionalisme yang berkembang di wilayah ini: qaumiyya dan wathaniyya (Drysdale, 1985). Nasionalisme qaumiyya, yaitu suatu paham kebangsaan yang didasarkan pada kesamaan bangsa, bahasa, dan latar belakang sejarah. Dalam hal ini mereka diikat oleh kesamaan sebagai bangsa Arab, berbahasa Arab dan diikat sejarah yang relative sama yaitu sejarah peradaban Islam yang sudah berlangsung berabad-abad lamanya. Pergolakan yang terjadi di satu wilayah akan

merembet ke wilayah yang lain dan ada kecenderungan untuk saling intervensi. Sebagai contoh ketika gelombang demokratisasi merebak di Bahrain sebuah negara monarchy dengan sunni sebagai penguasanya di tengah-tengah mayoritas kaum syiah, Arab Saudi melibatkan diri dalam pergolakan politik di negara ini dengan mengirimkan pasukannya untuk membantu penguasa Bahrain.

Semangat qaumiyya tidak hanya di level negara, namun juga di level rakyat. Penderitaan yang alami oleh rakyat Palestina akibat penjajahan Israel seolah menjadi “all Arabic core concern” (Rais, 1988). Pergolakan politik yang terjadi di Tunisia dengan cepat merembet ke negara-negara sekitarnya karena mereka tidak memiliki hambatan untuk mengakses berita dan informasi mengingat adanya kesamaan bahasa. Terlebih Tunisia, Aljazair, Maroko dahulu pada masa Kesultanan Islam merupakan satu kesatuan wilayah (dikenal dengan istilah wilayah Maghrib). Hal yang sama juga terjadi di Suriah ketika minoritas Syiah Alawi yang berkuasa menindas mayoritas Sunni, sentiment untuk melibatkan diri kalangan Sunni dalam pergolakan politik di Suriah demikian tinggi. Relawan-relawan jihad dari negara-negara Arab di sekitar Suriah untuk membantu oposisi di Syria juga masuk. Sementara itu Syiah Alawi dibantu oleh Hezbollah dari Lebanon Selatan dan Iran (kendatipun yang terakhir bukan negara Arab, namun sama-sama penganut Syiah).

Sikap saling intervensi ini bertentangan dengan semangat nasionalisme yang kedua yaitu wathaniyya. Paham kebangsaan ini didasarkan pada adanya satu kesatuan territory tertentu yang bernama negara. Problem utama dalam mengembangkan model nasionalisme kedua ini adalah tidak adanya latar belakang historis yang dapat dibanggakan sebagai negara, karena terbentuknya negara-negara di Timur Tengah relative baru yaitu pada awal abad sampai dengan pertengahan abad ke-20. Sementara ikatan sejarah yang terbentuk sebelum masing-masing kawasan menjadi negara merdeka adalah ikatan sejarah peradaban Islam

dengan sistem kesultanan/kekhalifahan. Beberapa negara berusaha membangun kebanggaan sejarah pada masa pra Islam seperti Mesir dengan kejayaan para fir'aun, atau Irak dengan sejarah peradaban Sungai Tigris dan Eufkrat atau dikenal dengan peradaban Mesopotamia, atau Jordan dengan kejayaan kerajaan Pompei, namun itu semua tidak efektif untuk membangkitkan kebanggaan mereka sebagai bangsa Mesir, bangsa Irak atau bangsa Jordan. Terlebih peradaban masa pra Islam tersebut adalah peradaban pagan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Tidak kuatnya ikatan nasionalisme wathaniyya membuat mudahnya suatu ide, gagasan, dan pemikiran berkembang lintas batas negara di Timur Tengah. Saringan ideologi dan budaya di masing-masing negara sangat lemah, karena sebenarnya mereka secara ideologi dan budaya relative sama. Oleh karena itu, suatu pemikiran keagamaan misalnya dengan gampang berkembang di berbagai negara di Timur Tengah. Terkait dengan fenomena Arab Spring, sebagai gambaran, aktor yang bergerak untuk menuntut diakhirinya rezim otoriter di berbagai negara di Arab adalah gerakan Ikhwanul Muslimin. Gerakan ini tumbuh pertama kali di Mesir tahun 1926 dibawah kepemimpinan Hassan Al-Banna. Lantas gerakan ini menyebar pengaruhnya ke Syria, Jordan, Palestina, Irak, Sudan, Tunisia, Maroko, Aljazair, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, Yaman dan seterusnya. Bahkan kemudian menyebar ke negara-negara Muslim di luar Timur Tengah bahkan ke Eropa dan Amerika.

Revolusi di Tunisia yang menggulingkan Presiden Zine al-Abidine bin Ali dipicu oleh peristiwa pembakaran diri seorang pedagang dan ketika kemudian menyebar menjadi gerakan massa, Partai An-Nahdha pimpinan Rachid Ghannouchi yang memiliki kedekatan dengan pemikiran Al-Ikhwan terlibat aktif dalam gerakan revolusi. Ghannouchi sendiri selama bertahun-tahun terusir dari negaranya (tinggal di Perancis) karena sikap kritis terhadap rezim Bin Ali. Ketika Presiden Bin Ali berhasil digulingkan Ghannouchi kembali ke negaranya,

ikut serta dalam pemilu dan akhirnya An-Nahdha memenangkan pemilu (*the Economist*, 29/10/2011). Kemudian di Maroko setelah Raja Muhammad IV melakukan reformasi politik agar gelombang Arab Spring tidak mengancam kekuasaannya dengan melakukan pemilu multi partai, Partai Keadilan dan Pembangunan yang juga memiliki kedekatan dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin memenangkan pertarungan dalam pemilu yang digelar pada 27 November 2011 (*the Washington Post*, 28/11/2011). Yang paling dramatis terjadi di Mesir yaitu ketika Ikhwanul Muslimin bersama kelompok-kelompok lain berhasil menggulingkan Presiden Mubarak. Ketika gerakan ini terlibat dalam pemilu legislative pada bulan November 2011 Al-Ikhwan berhasil memenangkan pemilu, kemudian berlanjut dengan pemilu presiden di bulan Juni 2012 dan kembali kandidat presiden dari Ikhwanul Muslimin (Mohammad Morsi) memenangkan pemilu dan dilantik sebagai Presiden Mesir bulan Agustus 2012. Tragisnya, setahun berikutnya Presiden Morsi dikudeta oleh Jenderal As-Sisi.

4.3. Dimensi Internasional: Turki, Dunia Islam dan Barat

Dimensi internasional yang tidak dapat diabaikan dalam dinamika politik di negara-negara Arab adalah peran Turki. Negara ini bukan negara Arab, namun pengaruhnya untuk mereformasi sistem politik di negara-negara Arab tidak dapat diabaikan. Keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan Turki dibawah Erdogan dalam membangun Turki yang modern dan disegani menginspirasi gerakan-gerakan Islam di kawasan Timur Tengah ketika melakukan upaya mewujudkan tatanan yang demokratis. Terlebih, kebijakan luar negeri Turki merespon Arab Spring adalah pro dengan gerakan-gerakan yang menginginkan perubahan rezim. Turki adalah negara yang memfasilitasi pertemuan-pertemuan kelompok oposisi Libya (NTC/National Transitional Council) sebelum Khadafi jatuh dan mengakui

pemerintahan transisi ini sejak 15 Juli 2011 sebelum PBB memberi pengakuan. Perdana Menteri Turki Tayyip Erdogan adalah pemimpin negara yang pertama kali mengunjungi Mesir setelah Mubarak jatuh. Majalah *Time* (13/9/2011) menggambarkan sambutan untuk Erdogan seperti “a rock star”. Ketika pergolakan politik terjadi di Syria, kembali PM Erdogan menunjukkan sikap tegasnya dengan membekukan hubungan diplomatiknya dengan rezim Bashar Assad. Erdogan mengatakan, “The Syrian people do not believe in Assad, nor do I. We also do not believe him.” (*Time*, 13/9/2011). Ketika eskalasi konflik di Syria semakin memanas, Turki termasuk negara yang gigih memperjuangkan intervensi militer bersama-sama dengan NATO dan negara ini menjadi tempat penampungan bagi ratusan ribu warga Syria.

Disaat Turki demikian ingin negara-negara Arab menjadi negara yang demokratis, negara-negara Barat terkesan ragu-ragu bahkan khawatir dengan dinamika politik yang terjadi di Timur Tengah. Sejak pembubaran FIS upaya-upaya untuk mendemokratiskan kehidupan politik di Timur Tengah bisa dikatakan mandeg. Dorongan untuk kembali mewujudkan tatanan politik yang lebih demokratis di Timur Tengah muncul ketika fenomena kekerasan-kekerasan politik di Timur Tengah merebak. Aksi-aksi terror dengan sasaran pemerintah yang otoriter atau kepentingan-kepentingan asing termasuk para turis asing merebak di akhir 1990-an. Sehingga muncullah gagasan untuk mendemokratiskan kehidupan politik di Timur Tengah. Ketika George W. Bush naik untuk kedua kalinya sebagai President AS, kebijakannya menyangkut dinamika politik di Timur Tengah selain tetap mendukung posisi Israel terhadap Palestina, juga promosi demokrasi di kawasan ini. Dia percaya bahwa terorisme di Timur Tengah akan dapat diatasi dengan mendemokratiskan kehidupan politik (White House, 2003). Demokrasi diyakini dapat memoderasi sikap-sikap politik yang radikal dan pada saat yang sama juga menghalanginya tampilnya rezim tirani. Munculnya penguasa

tiran akan memunculnya sikap oposisi dan ketika oposisi tidak memiliki saluran untuk mengekspresikan ketidaksetujuannya sangat mungkin cara-cara kekerasan yang kemudian ditempuh.

Hal ini akan menimbulkan citra negative terhadap kawasan ini dan dalam perkembangannya akan memunculkan *Islamphobia*. Pertemuan Organisasi Konferensi Islam (OKI) Kesebelas di Sinegal pada bulan Maret 2008 bertujuan untuk membangun image positif terhadap Islam, menghilangkan Islam phobia, dan mengintensifkan dialog antar peradaban (OIC, 2008). Pada kesempatan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi kesalahpahaman terhadap Islam adalah dengan menjadikan negara-negara Islam sebagai negara demokratis (Deplu, 2008). Oleh karena itu, Indonesia mendorong reformasi dalam tubuh OKI dengan memasukkan nilai-nilai demokrasi ke dalam Piagam OKI yang baru.

Namun, upaya untuk membangun sistem yang demokratis di Timur Tengah bukan hal yang mudah terutama semenjak Amerika Serikat menjadi sasaran serangan teroris pada 11 September 2001. Disaat AS dibawah Bush Jr mempromosikan demokrasi di Timur Tengah, pada saat yang sama sang Presiden menkampanyekan “war on terror” dan mengkategorikan negara-negara di dunia “either with us or with terrorist”. Kecurigaan bahwa pelaku terorisme berasal dari kalangan Islam terlebih setelah itu AS melancarkan serangan ke negara Islam (Afghanistan dibawah Taliban) yang dituduh menjadi pendukung dan pelindung Al-Qaeda memberikan legitimasi bagi negara-negara di Timur Tengah untuk menekan kelompok-kelompok Islam yang selama ini berseberangan dengan pemerintah dengan alasan “perang melawan terorisme”. Padahal belum tentu kelompok-kelompok tersebut menggunakan cara kekerasan untuk merealisasikan tujuannya. Dengan kata lain, isu terorisme ini telah menggeser isu demokratisasi yang selama ini dicoba diterapkan di Timur Tengah. Fenomena

ini tidak hanya terjadi di Timur Tengah, namun juga di negara-negara Muslim di kawasan Asia Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara (Foot, 2005).

Kenyataan bahwa negara-negara Barat seolah membiarkan ketika rezim otoriter di negara Muslim menekan kekuatan-kekuatan Islam menimbulkan tanda tanya seberapa seriuskah Barat mendukung demokratisasi di negara-negara Muslim (Khan, 2003). Keraguan ini muncul terutama ketika HAMAS sebagai salah satu gerakan yang menentang eksistensi Israel memenangkan pemilu yang digelar di wilayah pendudukan pada tahun 2006. Ketika HAMAS menjadi pemenang dalam kontestasi demokrasi (pemilu), rakyat Palestina mendapat hukuman dari Barat. Negara-negara Barat akan mengakui HAMAS sebagai pemenang pemilu jika gerakan ini mau meletakkan senjata, tidak menggunakan cara-cara kekerasan, mengakui eksistensi Israel, dan mau menerima semua kesepakatan yang dicapai dalam perundingan antara Israel dan Otoritas Palestina (PLO). HAMAS menolak syarat-syarat tersebut, akibatnya gerakan ini diisolasi dari pergaulan internasional, bantuan-bantuan dari luar (Barat) yang selama ini diperoleh rakyat Palestina dihentikan, pajak yang dibayar oleh rakyat Palestina kepada Israel dan semestinya dikembalikan lagi kepada rakyat Palestina juga dihentikan, dan pembekuan asset-asset milik HAMAS (Muttaqien, 2012). Perlakuan terhadap HAMAS ini mengulang perlakuan terhadap FIS di Aljazair di awal 1990an.

Ketidaktegasan Barat terhadap kudeta militer di Mesir kembali memunculkan sikap skeptis kekuatan-kekuatan Islam akan keseriusan Barat dalam mendorong demokratisasi di Timur Tengah. Kembalinya kekuatan militer Mesir dengan cara kudeta militer diiringi dengan penangkapan para aktivis Muslim, pemberangusan media massa yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa militer, pembekuan asset-asset milik Ikhwanul Muslimin, dan yang sangat tragis pembantaian para demonstran yang menentang rezim militer di lapangan Rabi'a Al-'Adawiyya pada bulan Agustus 2013 yang terekspos secara luas di media massa

tanpa sikap tegas dari Barat untuk menghentikan dan menekan rezim militer di Mesir membuktikan adanya standard ganda Barat dalam menerapkan mempromosikan dan menegakkan sistem demokrasi.

Dengan sikap semacam ini akan sangat mungkin terjadi gelombang balik demokratisasi di Timur Tengah, yaitu cara-cara tidak demokratis seperti kudeta akan “dibenarkan” manakala sistem demokrasi yang diterapkan ternyata memberikan keleluasaan kepada kekuatan Islam yang mendapat dukungan rakyat memegang tampuk kekuasaan.

Bab 5

Kesimpulan

Apabila diamati perkembangan politik di Timur Tengah sejak munculnya fenomena Arab Spring yaitu gelombang demokratisasi yang melanda dunia Arab di musim semi 2011 ada satu alasan pokok mengapa ini bisa terjadi, yaitu ketidakpuasan secara massive rakyat kepada gaya kepemimpinan rezim penguasa di negara-negara Arab. Umumnya penguasa di negeri-negeri tersebut otoriter, korup dan hidup glamour di tengah situasi dan kondisi rakyat yang miskin, atau kalau rakyatnya berkecukupan seperti di negara-negara Teluk mereka menghadapi sumbatan-sumbatan yang menghalang-halangi mereka untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik yang lebih luas. Peristiwa bakar diri seorang pedagang di Tunisia yang tidak berdaya menghadapi arogansi kekuasaan dan menyulut protes seantero negeri menjadi momentum yang menggerakkan rakyat di negara-negara sekitarnya untuk melakukan hal yang sama: menuntut perubahan rezim. Pergerakan massa ini didukung oleh proses penyebaran informasi yang cepat sebagai imbas dari globalisasi teknologi. Kekerasan dan penindasan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini dilakukan rezim yang berkuasa, tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Dengan kata lain ada keterkaitan yang sangat kuat antara globalisasi dan tuntutan mewujudkan tatanan yang lebih demokratis.

Bagaimana dinamika politik di negara-negara Arab sebagai imbas dari Arab Spring setidaknya mengarah pada empat trend. Pertama, terjadi pergantian rezim dan diiringi dengan upaya-upaya untuk semakin meningkatkan partisipasi rakyat dalam kehidupan politik seperti yang terjadi di Tunisia. Kedua, tidak terjadi pergantian rezim karena rezim yang berkuasa melakukan antisipasi dengan melakukan reformasi politik menuju ke arah yang lebih

demokratis seperti yang terjadi di Maroko, Aljazair, dan Kuwait. Ketiga, tidak terjadi perubahan rezim karena rezim yang berkuasa semakin kuat membatasi perlawanan rakyat, bahkan perlawanan rakyat tersebut disikapi dengan kekerasan bersenjata. Fenomena ini bisa dilihat di Syria, Bahrain, dan Libya sekalipun untuk yang terakhir pada akhirnya rezim yang berkuasa yaitu Khadafi tumbang. Keempat, terjadi perubahan rezim yang dilanjutkan dengan menguatkan pranata demokrasi dalam situasi kekuatan lama sisa-sisa otoritarianisme masih memegang kendali kekuasaan. Ketika kekuatan baru tampil sebagai konsekuensi dari sistem politik yang demokratis, kekuatan lama mengambil alih kekuasaan sehingga terlahir otoritarianisme baru. Fenomena yang terakhir ini terjadi di Mesir.

Dinamika perubahan di Timur Tengah ini, selain dipicu oleh peristiwa di Tunisia, juga disebabkan oleh semakin kuatnya pengaruh aktor non-negara terutama gerakan-gerakan keagamaan yang menekankan pembentukan basis masyarakat sebagai pilar untuk meraih dukungan. Gerakan keagamaan dengan karakter kosmopolitan seperti Ikhwanul Muslimin memiliki jaringan lintas batas negara sehingga resonansi dan irama pergerakan dapat terkoordinasi dengan baik. Pandangan Ikhwanul Muslimin yang menerima demokrasi sebagai suatu sistem yang dapat mencegah lahirnya penguasa tirani, memungkinkan pergerakan ini berkembang di tengah stigma “terroris, ekstrimis, dan fundamentalis” untuk memberikan label bagi mereka yang konsisten dengan Islam.

Jaringan lintas batas negara yang dilakukan gerakan keagamaan tidak hanya bersinggungan dengan antar gerakan Islam, namun juga dengan penguasa atau aktor negara yang mendukung tumbuhnya kekuatan-kekuatan oposisi. Dalam hal ini Turki dan dalam batas-batas tertentu juga Qatar menunjukkan komitmennya untuk menyemaikan nilai-nilai demokrasi di Timur Tengah. Dukungan yang ditunjukkan oleh aktor negara terhadap

kekuatan-kekuatan oposisi tentu memiliki bobot yang tinggi dalam sistem internasional kontemporer yang masih menempatkan negara sebagai unit utama.

Dinamika pergerakan tidak hanya dalam ruang lingkup domestik, namun juga regional dan internasional. Masuknya nilai-nilai baru dan perkembangan teknologi informasi di negara-negara Arab, dalam lingkup domestik dan regional Arab, mempengaruhi pola interaksi dan penyebaran informasi. Kalangan muda yang *melek* dengan informasi dan menjadi kekuatan utama dalam Arab Spring biasa menggunakan media sosial dalam interaksi diantara mereka dan menjadikan media tersebut untuk melakukan pergerakan massa. Situasi dan kondisi yang ada di lapangan menyangkut demonstrasi, protes, kekerasan aparat keamanan, maupun seruan-seruan aksi disebarluaskan melalui media sosial. Penyebaran informasi dan pergerakan tidak hanya dalam ruang lingkup domestik akan tetapi juga regional bahkan internasional.

Hal terakhir yang dapat disimpulkan dari fenomena Arab Spring adalah bahwa merebaknya Arab Spring menyisakan permasalahan yang timbul karena kecurigaan. Kalangan Islam curiga bahwa negara-negara Barat tidak serius dalam mendukung penegakkan sistem demokrasi di Timur Tengah dengan adanya kenyataan bahwa sistem ini memberikan jalan bagi kalangan Islam untuk tampil berkuasa. Sementara itu, pihak Barat juga merasa khawatir ketika gerakan Islam tampil berkuasa maka kepentingan-kepentingan mereka di negeri-negeri Muslim akan terancam, sehingga ketika ada cara-cara yang tidak demokratis dilakukan oleh rezim yang pro Barat di negara-negara Timur Tengah terlihat Barat “merestui” langkah-langkah tersebut. Pada titik inilah proses demokratisasi di Timur Tengah berada di persimpangan jalan.

Daftar Pustaka

- Al-Hargan, Raed Abdulaziz, 2012. "Saudi Arabia: Civil Rights and Local Actors". *Middle East Policy*, Vol. XIX, No. 1, Spring, pp. 126-139.
- Bahry, Louay Y., 2001. "The New Arab Media Phenomenon: Qatar's Al-Jazeera". *Middle East Policy*, Vol. VIII, No. 2, June, pp. 88-99.
- Bengio, Ofra, 2012. "Are Iraq and Turkey Models for Democratization". *Middle East Quarterly*, Summer, pp. 53-62.
- Departemen Luar Negeri (Deplu), 2008. "Statement by President of the Republic of Indonesia at the 11th Summit of the Organization of the Islamic Conference, Dakar, Senegal. 15 March 2008", tersedia di www.deplu.go.id, diakses 2 November 2010.
- Doron, Daniel, 2012. "Free Market Can Transform the Middle East". *Middle East Quarterly*, Spring, pp. 15-22.
- Drysdale, A. dan G.H. Blake, 1985. *The Middle East and North Africa: A Political Geography*. New York: Oxford University Press.
- Esposito, John L. 1995. *Islamic Threat: Myth or Reality?* New York: Oxford University Press.
- Foot, R., 2005. "Collateral Damage: Human Rights Consequences of Counterterrorist Action in the Asia Pacific". *International Affairs*, Vol. 81, No. 2.
- Huntington, Samuel P. 1991. *Third Wave of Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman Oklahoma: University of Oklahoma.
- Khan, M., 2003. "Prospect for Muslim Democracy: the Role of the U.S. Policy". *Middle East Policy*, Vol. 10, No. 3.
- Khashan, Hilal, 2011. "Middle Eastern Upheavals: the View from Syria and Lebanon". *Middle East Quarterly*, Summer, pp. 25-30.
- Landis, Joshua, 2012. "The Syrian Uprising of 2012: Why the Assad Regime is Likely to Survive to 2013". *Middle East Policy*, Vol. XIX, No. 1, Spring, pp. 72-84.
- Lesch, Ann M., 2011. "Egypt's Spring: Causes of Revolution". *Middle East Policy*, Vol. XVIII, No. 3, Fall, pp. 35-48.

- Linklater, Andrew. 2005. "Globalization and Transformation of Political Community" in John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press, pp. 709-725
- McGrew, Anthony. 2005. "Globalization and Global Politics" in John Baylis & Steve Smith, *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press, pp. 19-40.
- Muttaqien, M., 2012. *The Rise of the Islamic Resistance Movement (HAMAS): Causes and Consequences*. Surabaya: Cakra Studi Global Strategis (CSGS).
- Organization of Islamic Conference (OIC), 2008. "The 11th Session of Islamic Summit Conference: Dakkar Declaration", tersedia di <http://www.oic-oci.org/is11/english/DAKKAR-DEC-11SUMMIT-E.pdf>, diakses 10 November 2013.
- Rais, M.A. 1988. *Politik dan Pemerintahan di Timur Tengah*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM.
- Snider, Erin A, and Faris, David M., 2011. "The Arab Spring: U.S. Democracy Promotion in Egypt". *Middle East Policy*, Vol. XVIII, No. 3, Fall, pp. 49-62.
- The Economist*. 2011. "Tunisia's General Election: Islamist to the fore". 29 October.
- The Washington Post*. 2011. "Moroccan Islamist Party Latest to Win Election Inspired by the Arab Spring". 28 November.
- Time*. 2011. "Why Turkey's Erdogan is Greated Like A Rock Star in Egypt". 13 September.
- Tobin, Sarah A., 2012. "Jordan's Arab Spring: the Middle Class and Anti-Revolution". *Middle East Policy*, Vol. XIX, No. 1, Spring, pp. 96-109.
- Unver, H. Akin, 2013. "Turkey, Past and Future: the Forgotten Secular Turkish Model". *Middle East Quarterly*, Winter, pp. 57-64.
- White House, 2003. "President Bush Presses for Peace in the Middle East", <http://www.whitehouse.gov/news/releases/2003/05/20030509-11.html> diakses 10 November 2013
- Voll et al, John, 2012. "Political Islam in the Arab Awakening: Who Are the Major Players". *Middle East Policy*, Vol. XIX, No. 2, Summer, pp. 10-35.